

TRY OUT UJIKOM PPK TIPE C

5 Set Try Out
@60 Soal

(Update Perpres
No. 46 Tahun 2025)

Disertai
**KATA
KUNCI**
pada tiap
soal

Baihaki, S.Si., M.M.



TRY OUT

UJIKOM

PPK TIPE C

5 Set Try Out @ 60 Soal
Update Perpres No. 46 Tahun 2025
Disertai Kata kunci pada tiap soal

Baihaki, S.Si., M.M.



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

TRY OUT UJIKOM PPK TIPE C

Copyright @ 2026 By Baihaki, S.Si., M.M.

All right reserved

Penulis

Baihaki, S.Si., M.M.

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-303-0

Cetakan ke-1, April 2026

15,5 x 23 cm, vi + 98 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Kebutuhan pemahaman tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi syarat dalam beberapa tugas pada instansi pemerintah. Pemahaman tersebut memerlukan pembuktian dengan lulus pada ujian kompetensi tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Untuk dapat lulus ujian kompetensi pengadaan barang/jasa, peserta perlu mengenal pola-pola soal ujian sesuai levelnya. Mulai tahun 2026, untuk mendapatkan sertifikat PBJP pada level 2/PPK Tipe C, LKPP mensyaratkan lulus Ujikom PPK Tipe C sebagai salah satu syarat kelulusannya. Oleh karena itu, penulis menyajikan buku **Try Out PPK Tipe C** ini sebagai sarana persiapan ujikom PPK Tipe C sesuai indikator kompetensi. Dengan mempelajari soal-soal pada buku ini diharapkan pembaca dapat menguasai trik-trik menjawab soal ujian dengan benar sesuai waktu ujian yang ditentukan.

Pada buku Try Out UJIKOM PPK Tipe C ini, soal- soal sudah disesuaikan dengan Perpres No. 46 Tahun 2025 yang berlaku sejak 30 April 2025. Kami juga memberikan **kata kunci** yang ditandai dengan huruf tebal dalam soal untuk membantu menentukan pilihan jawaban. Tersedia kunci jawaban pada bagian akhir buku agar pembaca lebih teriniasi untuk mempelajari modul terlebih dahulu dan berusaha menjawab sesuai yang sudah dipelajari sebelum melihat kunci jawaban. Harap diingat, saat ujian tidak ada penanda kata kunci soal, sehingga perlu berlatih soal untuk dapat menentukan kata kunci pada soal.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kesiapan mental dan fisik. Dengan persiapan yang baik dan doa yang khusyuk, yakinlah bahwa semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan dan ujian akan dapat diatasi. Keyakinan yang kuat akan suatu keberhasilan adalah modal batin yang besar artinya bagi suatu kesuksesan.

Selamat belajar dan semoga berhasil.

Penulis

Baihaki, S.Si., M.M.

KIAT SUKSES LULUS UJIKOM PPK TIPE C

Sertifikat PPK Tipe C pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) adalah sertifikasi kompetensi untuk menjadi pelaku pengadaan barang/jasa (PBJP) khususnya PPK untuk pekerjaan yang sederhana. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Siapa yang wajib memiliki sertifikat PPK Tipe C ? Calon pelaku PBJP (PPK dan PPTK)

Sertifikat PBJ PPK Tipe C dapat digunakan untuk:

- Menjadi prasyarat untuk menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) pada pekerjaan yang sederhana
- KPA yang merangkap PPK
- PPTK yang mendapat pendelegasian tugas PPK
- Melengkapi persyaratan Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah
- Meningkatkan kredibilitas dan peluang karier di bidang pengadaan

Sertifikat PPK Tipe C dapat diperoleh melalui pelatihan dan ujian sertifikasi PBJ PPK Tipe C yang diselenggarakan oleh LKPP atau lembaga pelatihan.

Materi pelatihan dan ujian sertifikasi PBJP PPK Tipe C meliputi:

- Melakukan perencanaan PBJP level 2
- Mengelola kontrak PBJ Level 2
- Mengelola PBJP secara swakelola PBJP Level 2

Agar mudah memahami materi PPK Tipe C ada beberapa kiat “**jurus jitu**” sebagai berikut :

1. Pahami ketentuan yang sesuai aturan Perpres 16/2021 berikut perubahannya dan peraturan LKPP
2. Pahami indikator-indikator keberhasilan yang ada pada setiap modul (modul 1 hingga modul 3)
3. Soal-soal ujian diambil dari setiap indikator keberhasilan dengan jumlah soal sebanyak 60 soal harus dikerjakan dalam waktu 90 menit dengan ambang batas kelulusan 70.
4. Ujian buka buku modul, bahan tayang dan Perpres 16/2021 dan perubahannya
5. Kerjakan mulai dari soal yang mudah dan jika ada sulit menjawab, silahkan buka buku.
6. Peserta dapat menggunakan 5 W - 1 H (What, When, Where, Who, Why dan How) untuk memperkirakan variasi soal dari setiap materi ujian.
7. **Kata kunci pada buku ini**, diberi tanda dengan huruf tebal (*bold*) untuk membantu menentukan pilihan jawaban

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Kiat Sukses Lulus Ujian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) PPK Tipe C	iii
Daftar Isi.....	v
Try Out – 1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PPK Tipe C	1
Try Out – 2 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PPK Tipe C	19
Try Out – 3 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PPK Tipe C	37
Try Out – 4 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PPK Tipe C	55
Try Out – 5 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PPK Tipe C	73
Kunci Jawaban Try Out - 1	92
Kunci Jawaban Try Out - 2	93
Kunci Jawaban Try Out - 3	94
Kunci Jawaban Try Out - 4	95
Kunci Jawaban Try Out - 5	96
Profil Penulis	97

“

TRY OUT - 1

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PPK TIPE C

”

Nama : _____

Instansi : _____

- Soal *try out* berjumlah 60 soal, dengan rincian :

No	Bentuk Soal	Jumlah Soal	Skor Nilai
1	Pilihan Ganda	60	$60 \times 1,6667 = 100$
	<i>*Passing grade 70</i>		

- Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 90 menit.

Silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Jika benar memperoleh skor 1,6667 (satu koma enam tujuh), jika salah memperoleh skor 0 (nol).

1. Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi dalam melaksanakan pengadaan seragam harus melakukan **identifikasi kebutuhan**. Siapa yang bertanggung jawab melakukan identifikasi kebutuhan ?
 - a. PA/KPA
 - b. PPK

- c. Tim teknis
 - d. Pejabat pengadaan
2. Identifikasi kebutuhan harus dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi barang/jasa yang dibutuhkan oleh pengguna akhir. Dalam mengidentifikasi kebutuhan, **hal-hal apa yang perlu diperhatikan ?**
- a. Prinsip efisien dan efektif
 - b. Prinsip adil dan akuntabel
 - c. SDM yang kompeten
 - d. Menghindari pertentangan kepentingan
3. **Identifikasi kebutuhan** dilakukan pada tahap :
- a. Pemilihan penyedia
 - b. Perencanaan pengadaan
 - c. Persiapan pengadaan
 - d. Penandatanganan kontrak
4. Dalam mengidentifikasi kebutuhan perlu melakukan *spend analysis*. Ada 4 langkah dalam melakukan *spend analysis* yaitu
- a. Identifikasi, analisis, tabulasi, perhitungan
 - b. Efisiensi, pembersihan, efektifitas, analisis
 - c. Kebijakan, etika, tujuan dan prinsip
 - d. Tabulasi, pembersihan, kategorisasi, analisis
5. Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi melakukan pengadaan **seragam** untuk pakaian dinas untuk 70 orang pegawai yang harus diukur sesuai dengan ukuran badan masing-masing pegawai. Ini termasuk jenis pengadaan:
- a. Barang
 - b. Jasa lainnya

- c. Pekerjaan konstruksi
 - d. Jasa konsultan
6. Cara pengadaan yang paling tepat untuk **pengadaan seragam** pegawai Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi adalah
- a. Swakelola
 - b. Penyedia
 - c. Tender
 - d. E-katalog
7. Pada tahap persiapan pengadaan. PPK harus menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis yang komprehensif. **Komponen spesifikasi** teknis terdiri dari
- a. Mutu, jumlah, waktu dan pelayanan
 - b. Efisien, efektif, adil dan akuntabel
 - c. Mutu, SNI, TKD dan ramah lingkungan
 - d. Mutu, jumlah, komprehensif dan adil
8. Pihak yang bertugas **membantu PPK** dalam menyusun spesifikasi teknis adalah
- a. Tim teknis
 - b. Tim pendukung
 - c. Inspektorat
 - d. Bendahara
9. Hal hal yang **TIDAK** harus di prioritaskan dalam menyusun spesifikasi teknis oleh PPK Adalah
- a. Produk dalam negeri
 - b. Produk ber SNI
 - c. Produk ramah lingkungan
 - d. Produk impor

10. PPK dinas kesehatan akan melaksanakan pengadaan **suku cadang** alat kesehatan. Apa metode penyusunan spesifikasi teknis mutu yang paling tepat ?
 - a. Merk/tipe
 - b. Sampel
 - c. komposisi
 - d. Produk SNI
11. PPK dinas pendidikan akan melaksanakan pengadaan genset dengan kapasitas 650 KVA yang termasuk **alat berisiko tinggi**. Apa komponen spesifikasi teknis pelayanan yang harus ada ?
 - a. Komposisi barang
 - b. Sertifikat laik operasi (SLO)
 - c. Sertifikat teknisi
 - d. Brosur dari pabrikan
12. PPK dinas perumahan akan melaksanakan pengadaan **jasa konsultan** desain interior perorangan senilai Rp 100 juta melalui pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan. Pada tahap persiapan, PPK harus menyusun dan menetapkan ?
 - a. Spesifikasi teknis
 - b. KAK
 - c. Identifikasi kebutuhan
 - d. RUP
13. Contoh spesifikasi **input** jasa konsultan pengawasan adalah
 - a. Pendidikan S1 arsitektur, pengalaman 3 tahun
 - b. Laporan harian, mingguan dan bulanan
 - c. Mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan
 - d. Menyusun laporan akhir

14. Siapa yang bertanggungjawab untuk menyusun dan **menetapkan HPS** ?
- PA/KPA
 - Tim teknis
 - Tim pendukung
 - PPK
15. PPK wajib menyusun dan menetapkan HPS pada tahap persiapan. Pengadaan via *e-purchasing* di bawah ini **wajib ada HPS** ?
- Pengadaan laptop 3 unit Rp 45 juta
 - Pengadaan meja senilai Rp 105 juta
 - Pengadaan ATK senilai Rp 99 juta
 - Renovasi gedung senilai Rp 90 juta
16. Sebutkan **langkah-langkah** yang harus dilakukan dalam menyusun HPS berdasarkan **harga pasar** yaitu
- Cari sumber penyusun harga, kenali pasar, lakukan analisis harga
 - Cari sumber informasi harga, nilai pajak dan penetapan HPS
 - Cari sumber informasi harga, nilai PPh dan penetapan HPS
 - Cari sumber informasi harga, komponen pembentuk harga dan pajak
17. Pengadaan yang **tidak memerlukan HPS** adalah
- Pengadaan ATK senilai Rp 190 juta melalui *e-purchasing*
 - Pengadaan laptop senilai Rp 150 juta melalui *e-purchasing*
 - Pekerjaan terintegrasi melalui tender
 - Pengadaan meja senilai Rp 880 juta melalui *e-purchasing*

18. Biaya pembangunan gedung sekolah dasar di DKI Jakarta Rp 5 Miliar dengan nilai indeks 1. Jika Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan membangun gedung sekolah dasar dengan spesifikasi yang sama, berapa biaya yang diperlukan ? indeks **Kota Tangsel 1,04**.
- Rp 5 miliar
 - Rp 5,2 miliar
 - Rp 5,5 miliar
 - Rp 6 miliar
19. Salah satu langkah dalam **menyusun HPS** adalah mencari dan mengumpulkan sumber informasi harga. Dalam melakukan kegiatan tersebut **PPK dibantu** oleh ?
- Pejabat pengadaan
 - PA/KPA
 - Tim teknis
 - Penyedia
20. Kapan **waktu penetapan HPS** waktu pengadaan barang dengan metode pascakualifikasi ?
- 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran
 - 28 hari kalender sebelum batas akhir pemasukan penawaran
 - 28 hari kalender sebelum pemasukan dokumen kualifikasi
 - 28 hari kalender sebelum undangan penawaran
21. PPK dinas pendidikan akan melaksanakan pengadaan motor roda dua sebanyak 5 unit dengan harga Rp 30 juta per unit melalui pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan. Apa **bentuk kontrak** yang paling tepat ?
- SPK
 - Surat perjanjian

- c. Surat pesanan
 - d. Kuitansi
22. Apa **jenis kontrak** yang paling tepat untuk pengadaan 5 unit kendaraan bermotor ?
- a. Harga satuan
 - b. Kontrak payung
 - c. Putar kunci
 - d. Lumsum
23. Sebutkan **lampiran dari SPK** ?
- a. SSUK, SSKK, jadwal dan spesifikasi teknis
 - b. Syarat umum SPK
 - c. SSKK
 - d. Jadwal pelaksanaan
24. Siapa yang berhak menandatangani SPK
- a. Pihak pertama : pejabat pengadaan dan pihak kedua : direktur penyedia
 - b. Pihak pertama : PPK dan pihak kedua : pejabat pengadaan
 - c. Pihak pertama : PPK dan pihak kedua : direktur penyedia
 - d. Pihak pertama : pejabat pengadaan dan pihak kedua : bendahara
25. Tahapan perumusan kontrak terdiri dari
- a. Penandatanganan kontrak, serah terima lokasi, persiapan kontrak dan mobilisasi
 - b. Rancangan kontrak, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak dan serah terima
 - c. Rancangan kontrak, sppbj, rapat persiapan dan penandatanganan kontrak

- d. Identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan
26. Paket pengadaan di bawah ini **TIDAK** menggunakan SPK
- a. Pengadaan perlengkapan kantor senilai Rp 150 juta
 - b. Pengadaan seragam senilai Rp 100 juta
 - c. Pengadaan laptop melalui *e-purchasing* senilai Rp 150 juta
 - d. Pengadaan ATK senilai Rp 80 juta
27. Setelah SPK ditandatangani untuk **pekerjaan renovasi gedung** senilai Rp 200 juta, apa yang harus dikeluarkan oleh PPK ?
- a. SPMK
 - b. SPM
 - c. SPP
 - d. BAST
28. **Instrumen pengendalian** kontrak untuk pekerjaan yang sederhana adalah
- a. Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan
 - b. Melakukan addendum kontrak
 - c. Mengeluarkan surat peringatan
 - d. Membuat jadwal mobilisasi
29. PPK dinas pendidikan sedang melaksanakan pengadaan laptop senilai Rp 200 juta sebanyak 20 unit. 2 minggu setelah penandatanganan kontrak penyedia melaporkan bahwa laptop yang sesuai spek teknis dalam SPK sudah **diskontinu** dan tidak diproduksi lagi. Apa yang harus dilakukan oleh PPK ?
- a. Membatalkan kontrak
 - b. Melakukan addendum kontrak
 - c. Memberikan surat peringatan
 - d. Menyatakan kontrak kritis

30. Metode pembayaran yang paling tepat untuk pekerjaan **jasa kebersihan** dengan nilai kontrak Rp 200 juta selama 12 bulan ?
- Sekaligus
 - Termin
 - Bulanan
 - Harian
31. Bagaimana pengenaan **denda keterlambatan** yang paling tepat untuk pengadaan 1 unit genset 300 KVA senilai Rp 200 juta ?
- 1/1000 dari nilai total kontrak sebelum PPN
 - 1/1000 dari bagian kontrak sebelum PPN
 - 1/1000 dari nilai total kontrak setelah PPN
 - 1/1000 dari bagian kontrak setelah PPN
32. Siapa yang membantu PPK dalam **mengarsipkan dan menyimpan** seluruh tahapan dokumen pelaksanaan kontrak ?
- Tim teknis
 - Tim pendukung
 - Pejabat pengadaan
 - Bendahara
33. Cara untuk memastikan apakah spesifikasi teknis barang yang dipesan sesuai dengan dengan ketentuan kontrak dan tidak ada **penyimpangan pemalsuan barang** adalah
- Barang diproduksi oleh pabrikan/distributor resmi
 - Barang sampai dilokasi tepat waktu
 - Meminta surat pernyataan dari penyedia barang
 - Memastikan brosur yang ditawarkan asli dari pabrikan

34. **Langkah-langkah** dalam melakukan **serah terima** hasil pekerjaan adalah

1. Membuat berita acara serah terima
2. Melakukan persiapan penerimaan
3. Melakukan pemeriksaan

Mana tahapan yang benar ?

- a. 1,2,3
- b. 2,3,1
- c. 3,2,1
- d. 3,1,2

35. **Dokumen utama** yang harus diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan adalah

- a. Dokumen kontrak
- b. Surat pengantar
- c. Surat jalan
- d. Bukti pembelian dari toko

36. Apa yang harus dilakukan oleh PPK jika hasil pemeriksaan ternyata **tidak sesuai** dengan ketentuan kontrak ?

- a. Menerima hasil pemeriksaan
- b. Menolak hasil pemeriksaan
- c. Melakukan addendum kontrak
- d. Membatalkan kontrak

37. **Tahapan serah terima** pengadaan barang adalah

1. Perhitungan prestasi 100%
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumentasi
3. Serah terima hasil pekerjaan
4. Pemeriksaan spesifikasi barang
5. Pemeriksaan fisik dan kuantitas barang

Susunan tahapan serah terima hasil pengadaan barang yg benar adalah

- a. 1,2,3,4,5
 - b. 2,5,4,1,3
 - c. 5,4,3,2,1
 - d. 4,5,3,2,1
38. Siapa yang bertanggungjawab untuk **menilai kinerja** penyedia barang/jasa ?
- a. PA/KPA
 - b. Pejabat pengadaan
 - c. Pokja pemilihan
 - d. PPK
39. Sebutkan indikator penilaian kinerja penyedia ?
- a. Kualitas dan kuantitas, biaya, waktu dan pelayanan
 - b. Mutu, jumlah, waktu dan pelayanan
 - c. Kualitas dan kuantitas, nilai kontrak dan serah terima
 - d. Serah terima, biaya, waktu dan pejabat penandatangan kontrak
40. Kapan dapat dilakukan **penilaian kinerja** untuk pengadaan **barang** ?
- a. Setelah tanda tangan kontrak
 - b. Setelah BAST
 - c. Setelah progres 100 %
 - d. Setelah addendum kontrak
41. Kerjasama pelaksanaan pelatihan Kompetensi PPK tipe C antara **Kementerian Infrastruktur Negara (KIN)** dengan **Pusdiklat LKPP**. Ini termasuk swakelola tipe....

- a. I
- b. II
- c. III
- d. IV

42. **Tahapan swakelola** adalah

- 1. Serah terima hasil pekerjaan
- 2. Perencanaan
- 3. Persiapan
- 4. Pelaksanaan
- 5. Pengawasan

Susunan tahapan urutan swakelola yg benar

- a. 1,2,3,4,5
- b. 2,3,4,5,1
- c. 5,4,3,2,1
- d. 5,3,4,2,1

43. Salah satu dokumen yang dihasilkan pada tahapan **perencanaan swakelola** adalah

- a. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK
- b. Kontrak
- c. Pengawasan
- d. Laporan

44. Pada kegiatan swakelola antara **Kementerian Infrastruktur Negara dengan LKPP**, siapa yang membentuk tim penyelenggara swakelola ?

- a. Tim persiapan dan pengawas oleh PA/KPA, tim pelaksana oleh pokja pemilihan
- b. Tim persiapan, pengawasan dan pelaksana oleh LKPP

- c. Tim persiapan dan pengawas oleh PA/KPA dan tim pelaksana oleh LKPP
 - d. Tim persiapan, pengawasan dan pelaksana oleh PA/KPA
45. Contoh pelaksanaan **swakelola tipe IV** adalah
- a. Dinas Kesehatan Kota A bekerja sama dengan perguruan tinggi swasta untuk pekerjaan pelatihan untuk tenaga Kesehatan.
 - b. Dinas Kesehatan Kota A bekerja sama dengan kader posyandu untuk kegiatan pemberian makanan tambahan pencegahan stunting.
 - c. Dinas kesehatan bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri untuk kegiatan penyusunan road map pengembangan RSUD
 - d. Dinas kesehatan bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia untuk kegiatan pelatihan tenaga dokter umum.
46. Sumber **referensi** yang dapat digunakan untuk pelaksanaan swakelola yang sumber dananya dari APBN ?
- a. SBM menteri keuangan
 - b. Hasil survey pasar
 - c. Harga satuan pemda setempat
 - d. Harga satuan yang dipublikasi oleh asosiasi
47. Jika saudara diangkat oleh KPA sebagai **anggota tim persiapan swakelola tipe II**, apa yang saudara lakukan ...
- a. Menetapkan spesifikasi teknis
 - b. Menyusun rencana kegiatan
 - c. Menetapkan RAB
 - d. Menandatangani kontrak

48. Siapakah yang menandatangani **kontrak swakelola tipe III** antara Dinas Kesehatan Kota A dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk kegiatan peningkatan kompetensi dokter umum?
- a. PPK dan Ketua IDI
 - b. Kepala dinas dengan Ketua IDI
 - c. Gubernur dengan Ketua IDI
 - d. Bupati dengan Ketua IDI
49. Bagaimana metode pembayaran **swakelola tipe II** antara Kementerian A dengan perguruan tinggi negeri setempat ?
- a. Sistem bulanan
 - b. Sistem sekaligus
 - c. Sesuai dengan ketentuan kontrak
 - d. Sistem 2 termin
50. Pada **swakelola tipe II** antara Dinas Kesehatan Kota A dengan perguruan tinggi swasta memerlukan tenaga ahli dari luar. Berapa batasan jumlah tenaga ahli dari yang diperbolehkan ?
- a. 10 %
 - b. 20 %
 - c. 30 %
 - d. 40 %
51. Dalam pelaksanaan kontrak swakelola tipe II, jika dalam pelaksanaan ada **perubahan kondisi lapangan** yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak. Apa yang harus dilakukan oleh PPK ?
- a. Pembatalan kontrak
 - b. Sanksi daftar hitam
 - c. Kontrak kritis
 - d. Addendum kontrak swakelola

52. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan **pengawasan** swakelola tipe II ?
- a. Tim pengawas
 - b. Tim perencana
 - c. Tim pelaksana
 - d. Tim teknis
53. **Hal-hal yang harus diawasi** oleh tim pengawas swakelola tipe II adalah
- a. Administrasi, teknis dan keuangan
 - b. Administrasi, fisik dan BAST
 - c. Teknis dan administrasi
 - d. Administrasi, pelaksanaan dan keuangan
54. Kapan tim pengawas **bertugas** mengawasi pekerjaan swakelola ?
- a. Pelaksanaan swakelola
 - b. Sejak kontrak ditandatangani
 - c. Perencanaan sampai dengan serah terima
 - d. Persiapan sampai dengan serah terima
55. **Kementerian Kesehatan** bekerja sama dengan **BRIN** untuk pengembangan obat kanker dengan nilai kontrak Rp 5 miliar. Jika dalam pelaksanaan memerlukan barang/jasa, maka mengikuti aturan yg mana ?
- a. Pedoman PBJP
 - b. Aturan di lembaga riset
 - c. Sesuai kesepakatan dalam kontrak
 - d. Aturan dari pemilik anggaran

56. Pelaksanaan swakelola tipe IV pemberian makanan tambahan pencegahan stunting antara **dinas kesehatan dengan kader posyandu** telah selesai dan akan dilakukan serah terima hasil pekerjaan. Siapa yang berwenang menandatangani BAST ?
- Kepala dinas dengan ketua kader posyandu
 - PPK dengan ketua kader posyandu
 - PPTK dengan ketua kader posyandu
 - PPK dengan pelaksana lapangan
57. Apa **dokumen yang diperlukan** sebelum dilakukan serah terima hasil pekerjaan ?
- Kontrak swakelola
 - Penetapan tipe swakelola
 - Penetapan penyelenggara swakelola
 - Berita acara pengawasan
58. **Setelah serah terima** dari ketua pokmas kepada PPK, apa yang harus dilakukan oleh PPK selanjutnya ?
- Serah terima PPK ke PA/KPA
 - Membatalkan kontrak
 - Serah terima PPK ke PPTK
 - Pemeriksaan dan pengujian
59. Kegiatan **persiapan swakelola** antara lain :
- Penetapan tipe swakelola
 - Penetapan penyelenggara swakelola
 - Pengawasan administrasi
 - Rencana kegiatan
 - Penyusunan jadwal

Ditentukan aktivitas yang benar pada tahap persiapan swakelola adalah

- a. 1,2,3,4,5
- b. 2,4,5
- c. 3,4,5
- d. 5,4,1

60. Contoh pelaksanaan **swakelola tipe III** adalah

- a. Komdigi dengan Telkom University untuk kegiatan penyusunan road map tahun 2025 sd 2030
- b. Komdigi dengan ITS untuk kegiatan studi kelayakan pengembangan laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi.
- c. Kemenkes dengan RS Persahabatan untuk medical check up pegawai
- d. Kemenkes dengan BRIN untuk kegiatan pengembangan obat kanker.

PROFIL PENULIS



Baihaki, S.Si., M.M.

Narasumber Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Lahir di Jakarta pada 5 Februari 1974, beragama Islam. Mempunyai banyak pengalaman dalam hal pengadaan barang dan/ jasa pemerintah termasuk mendampingi proses pengadaan serta menjadi saksi ahli di pengadilan.

Contact

Email

baihakifasilpbj@gmail.com

Media Sosial

<https://www.youtube.com/@BaihakiFasilPBJ>

https://www.instagram.com/baihaki_fasilpbj/

<https://www.tiktok.com/@baihaki.fasilpbj>

<https://www.facebook.com/p/Baihaki-Fasilitator-PBJ61576785622863/>

Marketplace

<https://shopee.co.id/hbfe5m6awx>

Link Membership channel youtube @baihakifasilpbj

https://www.youtube.com/channel/UCjnTCe6yn0S_buJfS_gwVpQ/join

Pendidikan Formal

1. D-III Kimia Terapan UI 1994 - 1997
2. S-1 Kimia Universitas Pakuan Bogor 2000 - 2002
3. S-2 Manajemen Agribisnis IPB 2008 - 2009

Pendidikan Non-Formal

1. TOT Fasilitator Kompetensi Level 1 LKPP (2021)
2. TOT Fasilitator Kompetensi PBJ Level 2 dan 3 LKPP (2020)
3. TOT Fasilitator Kompetensi PBJ Level 4 LKPP (2021)

Pengalaman Profesi

1. PNS di BPPT (1998 - 2018)
2. Narasumber PBJ dan Ahli kontrak PBJ di K/L/PD, BUMN. BUMD dan Swasta.
3. Penulis Modul Pelatihan PBJ LKPP
4. Tenaga Ahli Pendamping PBJ LKPP di berbagai Instansi pemerintah
5. Pengajar PBJ di LPKN. Icon Center, IAPI
6. Penulis buku Bank Soal PBJP Level 1

Pengalaman Jabatan

1. Ketua DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) DKI Jakarta 2019 - 2022
2. Ketua DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) DKI Jakarta 2022 - 2025

Kebutuhan pemahaman tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi syarat dalam beberapa tugas pada instansi pemerintah. Pemahaman tersebut memerlukan pembuktian dengan lulus pada ujian kompetensi tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Untuk dapat lulus ujian kompetensi pengadaan barang/jasa, peserta perlu mengenal pola-pola soal ujian sesuai levelnya. Mulai tahun 2026, untuk mendapatkan sertifikat PBJP pada level 2/PPK Tipe C, LKPP mensyaratkan lulus Ujikom PPK Tipe C sebagai salah satu syarat kelulusannya. Oleh karena itu, penulis menyajikan buku Try Out PPK Tipe C ini sebagai sarana persiapan ujikom PPK Tipe C sesuai indikator kompetensi. Dengan mempelajari soal-soal pada buku ini diharapkan pembaca dapat menguasai trik-trik menjawab soal ujian dengan benar sesuai waktu ujian yang ditentukan.

Pada Bank Soal PPK Tipe C ini, soal- soal sudah disesuaikan dengan Perpres No. 46 Tahun 2025 yang berlaku sejak 30 April 2025. Kami juga memberikan **kata kunci** yang ditandai dengan huruf tebal dalam soal untuk membantu menentukan pilihan jawaban. Tersedia kunci jawaban pada bagian akhir buku agar pembaca lebih terinisiasi untuk mempelajari modul terlebih dahulu dan berusaha menjawab sesuai yang sudah dipelajari sebelum melihat kunci jawaban. Harap diingat, saat ujian tidak ada penanda kata kunci soal, sehingga perlu berlatih soal untuk dapat menentukan kata kunci pada soal.